



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ 57 /SK/KPN/2/2020

TENTANG

**PEMBENTUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MEMBACA : Surat Keputusan Ketua pengadilan Negeri Kandangan Nomor: W15.U2/22/SK/KPN/1/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Kandangan.

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan perlu dilaksanakan evaluasi.
2. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Sri Nuryani, SH. Dari Hakim Pengadilan Negeri Kandangan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1156/DJU/SK/KP04.5/4/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
3. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Ivonne Sari Indah, S.Si dari Staf pada Pengadilan Negeri Kandangan menjadi Pelaksana pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MARI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 435/SEK/Kp.I/SK/VI/2019 tanggal 16 Juli 2019 Tentang promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
4. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Masrawan, SH. dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB menjadi Panitera Pengadilan Negeri Barabai berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 2492/DJU/SK/KP04.5/7/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum .
5. Bahwa dengan adanya mutasi Saudara Darmin, S.Sos, M.Ag dari Sekretaris Pengadilan Negeri pelaihari Kelas II menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1039/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
6. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Dewi Sartika, SE. dari Pelaksana pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1039/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

7. Bahwa dengan adanya promosi saudara Baidhowi dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 22/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tanggal 26 Januari 2020 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum .
8. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Rubiyanto Budiman, SH. Dari Hakim Pengadilan Negeri Kandangan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 18/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI maka terjadi perubahan struktur dalam tim maka perlu disempurnakan kembali susunan Tim Audit Internal yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
9. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas perlu ditunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi sebagai pelaksanaannya.
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

- MENGINGAT :
- a. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - c. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
 - d. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - e. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - f. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.
 - g. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - h. Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - i. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - j. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor: W15-U2/52/SK/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEDUA** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan melalui sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 26 Februari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,

DIAN ERDIANTO



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Nomor : W15-U2/51/SK/KPN/2/2020

Tanggal : 26 Februari 2020

**PEMBENTUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

A. TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

Penanggungjawab : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Koordinator : Bukti Firmansyah, SH. MH.

Sekretaris : Darmin, S.Sos. M.Ag.

B. KELOMPOK KERJA

1. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

Penanggungjawab : Inri Nova Sihaloho, SH. MH.

Anggota : Dicky Malik Ibrahim, SH.

2. AREA PENATAAN TATA LAKSANA

Penanggungjawab : Syamsuni, SH. M.Kn.

Anggota : Hudhan Mufazhal, S.I.P.

3. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Penanggungjawab : Muhammad Deny Firdaus, SH.

Anggota : Dony Andri Rodese Purba, A.Md

4. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Penanggungjawab : Muhammad Arsyad, SH.

Anggota : Dewi Sartika, S.E.

5. AREA PENGUATAN PENGAWASAN

Penanggungjawab : Akhmad Rosady, SH. MH.

Anggota : Rafiqah, S.T.

6. AREA PENINGKATAN PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Penanggungjawab : Bukti Firmansyah, SH. MH.

Anggota : Noorlaila Wardhani



Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ 2 /SK/KPN/2/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MEMBACA** : Surat Keputusan Ketua pengadilan Negeri Kandangan Nomor: W15.U2/22/SK/KPN/1/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Kandangan.
- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan perlu dilaksanakan evaluasi.
 2. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Sri Nuryani, SH. Dari Hakim Pengadilan Negeri Kandangan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1156/DJU/SK/KP04.5/4/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 3. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Ivonne Sari Indah, S.Si dari Staf pada Pengadilan Negeri Kandangan menjadi Pelaksana pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MARI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 435/SEK/Kp.I/SK/VI/2019 tanggal 16 Juli 2019 Tentang promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
 4. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Masrawan, SH. dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB menjadi Panitera Pengadilan Negeri Barabai berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 2492/DJU/SK/KP04.5/7/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum .
 5. Bahwa dengan adanya mutasi Saudara Darmin, S.Sos, M.Ag dari Sekretaris Pengadilan Negeri pelaihari Kelas II menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1039/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
 6. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Dewi Sartika, SE. dari Pelaksana pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1039/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

7. Bahwa dengan adanya promosi saudara Baidhowi dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 22/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tanggal 26 Januari 2020 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum .
8. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Rubiyanto Budiman, SH. Dari Hakim Pengadilan Negeri Kandangan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 18/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI maka terjadi perubahan struktur dalam tim maka perlu disempurnakan kembali susunan Tim Audit Internal yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
9. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas perlu ditunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi sebagai pelaksanaannya.
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

- MENINGAT :
- a. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - c. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
 - d. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - e. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - f. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.
 - g. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - h. Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - i. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - j. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - k. ~~Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.~~
 - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor: W15-U2/52/SK/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEDUA** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan melalui sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 26 Februari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,

DIAN ERDIANTO



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Nomor : W15-U2/57/SK/KPN/2/2020

Tanggal : 26 Februari 2020

**PEMBENTUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

A. TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

Penanggungjawab : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Koordinator : Bukti Firmansyah, SH. MH.

Sekretaris : Darmin, S.Sos. M.Ag.

B. KELOMPOK KERJA

1. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

Penanggungjawab : Inri Nova Sihaloho, SH. MH.

Anggota : Dicky Malik Ibrahim, SH.

2. AREA PENATAAN TATA LAKSANA

Penanggungjawab : Syamsuni, SH. M.Kn.

Anggota : Hudhan Mufazhal, S.I.P.

3. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Penanggungjawab : Muhammad Deny Firdaus, SH.

Anggota : Dony Andri Rodese Purba, A.Md

4. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Penanggungjawab : Muhammad Arsyad, SH.

Anggota : Dewi Sartika, S.E.

5. AREA PENGUATAN PENGAWASAN

Penanggungjawab : Akhmad Rosady, SH. MH.

Anggota : Rafiqah, S.T.

6. AREA PENINGKATAN PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Penanggungjawab : Bukti Firmansyah, SH. MH.

Anggota : Noorlaila Wardhani



Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO